

Analisis Wacana Hoaks Politik Jelang Pemilu 2024: Integrasi Pendekatan Kritis Teori Teun A. Van Dijk AI oleh Veritext

Elvi Maulida Harahap¹, Geprita Gulo², Nurfadhilah Pasaribu³, Wildani Putri Sagala⁴, Mustika Wati Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Indonesian Journal of Learning
Studies (IJLS)

Vol. 5, No. 2, 2025
E-SSN 2775-5231

Corresponding Author:

Elvi Maulida Harahap

elvimaulidaharahap53@gmail.com

Published by:

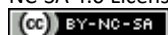
Perkumpulan Dosen Muslim
Indonesia



Copyright © 2025

The Author(s)

This article is licensed under CC BY-
NC-SA 4.0 License



Abstrak

Menjelang Pemilu 2024, ruang digital Indonesia dibanjiri hoaks politik yang disebar secara sistematis melalui media sosial. Artikel ini mengintegrasikan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Natural Language Processing dan analisis sentimen, untuk mengkaji struktur, ideologi, dan aktor di balik hoaks politik. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, memanfaatkan data dari media sosial dan portal berita daring. Hasil menunjukkan bahwa hoaks politik menggunakan strategi linguistik manipulatif seperti frasa imperatif, bahasa emotif, dan simbol religius untuk membentuk opini publik. Aktor penyebar hoaks meliputi tim politik formal, buzzer, akun anonim, hingga masyarakat umum yang minim literasi digital. AI terbukti mampu mendeteksi pola bahasa hoaks secara otomatis, namun masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan dinamika sosial. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat penting untuk membangun ekosistem informasi politik yang lebih sehat, adil, dan demokratis di era digital.

Kata kunci: *hoaks politik, analisis wacana kritis, AI, Pemilu 2024, opini publik*

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu aspek penting dari demokrasi yang memerlukan transparansi informasi dan partisipasi masyarakat berdasarkan data yang tepat. Namun, di era digital saat ini, penyebaran informasi mengalami percepatan dan juga terpengaruh oleh munculnya hoaks serta disinformasi, terutama dalam konteks politik. Menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, berbagai narasi politik yang provokatif, manipulatif, bahkan tidak benar, menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Menurut laporan *We Are Social* (2023), lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber utama untuk informasi politik, sehingga menjadikannya arena strategis bagi pembentukan dan distorsi opini publik.

Fenomena hoaks politik tidak hanya membawa dampak pada misinformasi, tetapi juga melibatkan ideologi, kepentingan, serta upaya hegemonik yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat tersebut. Penelitian oleh Van Dijk (2006) menekankan bahwa bahasa dalam

wacana politik berfungsi sebagai sarana reproduksi kekuasaan. Namun, banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti klasifikasi jenis hoaks secara dangkal atau statistik, tanpa menyelami dengan dalam struktur dan makna wacana di balik kalimat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya *gap* dalam pendekatan terhadap hoaks politik, yaitu antara analisis kuantitatif dan pemahaman kritis mengenai bahasa serta ideologi yang beroperasi dalam teks.

Di sisi lain, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*AI*) seperti *Natural Language Processing (NLP)* dan analisis sentimen telah menyediakan solusi praktis untuk mendeteksi konten yang bermasalah secara otomatis. Namun, menurut Creswell (2014), pendekatan berbasis data tetap memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam. *AI* sering kali tidak mampu menangkap ironi, sarkasme, atau strategi retorik lain yang digunakan dalam hoaks politik. Oleh sebab itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis wacana kritis dan pemrosesan bahasa alami sangat penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana hoaks berperan dalam membentuk wacana politik digital.

Selain itu, menjelang Pemilu 2024, keberadaan buzzer politik dan akun anonim semakin memperparah penyebaran disinformasi yang terorganisir. Banyak aktor politik memanfaatkan algoritma media sosial untuk memperkuat narasi tertentu sambil melemahkan lawan politik melalui framing negatif yang direkayasa. Dalam konteks ini, wacana hoaks tidak hanya berdiri sebagai teks yang salah, tetapi menjadi alat politik yang sangat strategis dalam perang persepsi publik. Realitas ini menuntut pendekatan yang tidak hanya mampu mengklasifikasikan kebenaran atau kepalsuan sebuah klaim, melainkan juga memahami konstruksi wacana yang mendasarinya.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendukung *VeriText*—sebuah startup yang berbasis *AI*—dalam mengembangkan metode analisis wacana digital yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperhatikan dimensi ideologis dan linguistik dari hoaks politik. Melalui literasi data, teknologi, bahasa, dan manusia. Penelitian

ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang pola penyebaran wacana hoaks politik menjelang Pemilu 2024 serta mengevaluasi sejauh mana *AI* dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mendeteksi, memahami, dan menggambarkan wacana di ruang digital Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. Van Dijk dan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* untuk menganalisis wacana hoaks politik menjelang Pemilu 2024. Data yang dianalisis merupakan teks digital yang dikumpulkan dari media sosial Twitter dan portal berita daring nasional melalui teknik digital *scraping* dan pemanfaatan API dengan kata kunci terkait hoaks politik dengan sampel 6 bukti hoaks. Proses analisis dilakukan secara bertahap berdasarkan empat literasi, yaitu literasi data, manusia, teknologi, dan bahasa.

Pada literasi data, digunakan teknik *Natural Language Processing (NLP)* dan sentiment analysis dengan bantuan *tools* seperti *Python* dan *RapidMiner* untuk mengidentifikasi tren penggunaan kata/frasa serta pola penyebaran wacana. Literasi manusia dilakukan dengan kajian kualitatif terhadap aktor sosial, kepentingan, dan ideologi yang muncul dalam wacana berdasarkan teori wacana kritis. Selanjutnya, literasi teknologi mengevaluasi

kemampuan AI dalam mengklasifikasikan dan mendeteksi hoaks dengan membandingkan hasil otomatisasi dan analisis manual. Terakhir, literasi bahasa memanfaatkan Analisis Wacana Kritis untuk memahami bagaimana bahasa dalam teks membentuk makna dan relasi kuasa dalam penyebaran hoaks. Validitas data dijaga melalui triangulasi antara hasil AI dan interpretasi manual, serta kolaborasi antar peneliti dalam proses coding untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi subjektivitas.

Hasil

Berikut ini beberapa bukti hoax menjelang pemilu 2024 di berbagai sosial media.

Gambar 1



Sebuah papan elektronik di Masjid Unsri diretas dan menampilkan pesan politis "Sholat no 1, Presiden No 2". Kejadian ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh turnbackhoax.id, menandakan adanya penyalahgunaan fasilitas publik untuk menyebarkan pesan politik yang memanfaatkan sentimen keagamaan.

Gambar 2



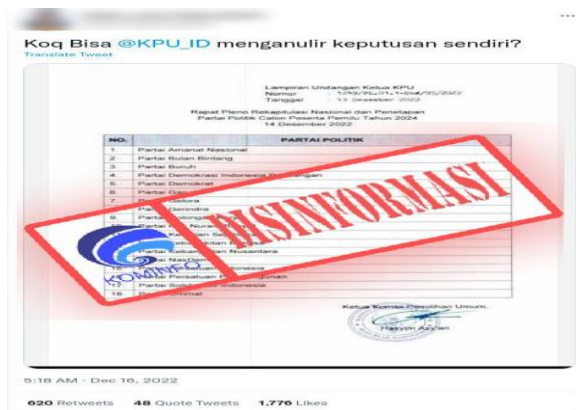
Terdapat foto dua orang yang memegang kaos bertuliskan "Presiden Indonesia" dengan tambahan tulisan "WELCOME #2024". Gambar ini telah diberi label "HOAX", menandakan bahwa konten tersebut adalah hasil manipulasi atau disinformasi terkait dukungan politik menjelang pemilu

Gambar 3



Sebuah unggahan menampilkan seseorang yang memegang bingkai berisi foto tokoh politik dengan narasi “kaulah yg pantas jadi RI-1” serta doa dan harapan rakyat kecil. Konten ini memanfaatkan bahasa religius dan emosional untuk membangun citra positif terhadap tokoh tertentu serta menggiring opini publik.

Gambar 4



Sebuah dokumen yang diklaim berasal dari KPU disebar di media sosial dengan pertanyaan provokatif mengenai keputusan KPU, serta cap besar “DISINFORMASI”. Gambar ini merupakan contoh penyebaran dokumen palsu atau manipulatif untuk menimbulkan keraguan terhadap otoritas resmi dan proses pemilu.

Gambar 5



Gambar menunjukkan cuitan dari akun bernama "Andi Arief" yang menyatakan, "Silahkan cek berita bahwa ada 7 kontainer surat suara yang telah dilemparkan di Tanjung Priok. Agar bukan fitnah, silakan periksa kebenarannya. karena berita ini telah menyebar." Tweet ini adalah contoh klasik menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi dan mendorong orang lain untuk memeriksa "kebenarannya", sementara secara bersamaan menyiratkan bahwa itu

sudah diketahui secara luas. Tweet semacam itu dapat berkontribusi pada penyebaran hoaks, terutama mengenai topik sensitif seperti pemilu. "1" di akhir mungkin menunjukkan tindak lanjut atau kelanjutan yang tidak digambarkan.

Gambar 6



Gambar menunjukkan serangkaian cerita atau postingan Instagram, dengan stempel "HOAX" merah besar yang dilapisi pada gambar tengah. Isi postingan tersebut tampaknya merupakan penawaran promosi untuk "iPhone 15 Promax 256 GB" dengan harga yang sangat murah (mengklaim "HANYA RP 79") sebagai penawaran khusus untuk Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945 terlihat, meskipun ini akan menjadi tanggal lama untuk iPhone 15).

Teks tersebut juga menyebutkan itu "khusus untuk 2 pengikut setia" dan mendorong klaim tawaran untuk "7.900.000." Ini adalah taktik penipuan yang umum, menggunakan harga yang sangat rendah untuk memikat orang, seringkali untuk produk yang tidak benar-benar tersedia atau berbeda secara signifikan dari apa yang diiklankan. Stempel "HOAX" secara eksplisit melabeli ini sebagai informasi palsu.

Pembahasan

Struktur Bahasa dalam Narasi Hoaks Politik

Narasi hoaks politik disusun dengan memperhatikan efek psikologis dan linguistik terhadap audiens. Struktur bahasa dalam narasi hoaks politik tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan Frasa Imperatif dan Ajakan

Dalam penyebaran hoaks politik digital, penggunaan frasa imperatif dan ajakan seperti "Sebarkan!", "Mohon dicek", atau "Waspada!" sering ditemukan untuk mendorong pembaca segera bertindak tanpa berpikir kritis. Frasa-frasa ini membangun rasa urgensi dan kewaspadaan yang menyesatkan, sehingga pembaca terdorong menyebarkan informasi tanpa verifikasi.

2. Klaim Dramatis atau Spekulatif

Klaim dramatis atau spekulatif seperti "Sudah dicoblos sebelum hari pemilu!" atau "Presiden batal ikut pemilu?" digunakan untuk memicu rasa takut, marah, atau penasaran. Klaim semacam ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat berita tanpa sumber yang jelas, sering kali dengan tanda seru atau huruf kapital untuk menambah efek dramatis.

3. Penggunaan Bahasa Emotif dan Religius

Penggunaan bahasa emotif dan religius juga sangat menonjol, misalnya pada frasa "Aamiin", "Doa rakyat kecil terkabul", atau "Sholat no 1, Presiden no 2". Strategi ini menunggangi emosi kolektif masyarakat, terutama dengan menyisipkan simbol atau idiom agama, sehingga nilai moral dan kepercayaan publik dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.

4. Pengaburan Fakta melalui Bentuk Tanya

Pengaburan fakta kerap dilakukan melalui bentuk tanya retorik seperti "Apa benar Jokowi dukung Anies?" atau "Katanya KPU curang?". Kalimat tanya ini tidak membutuhkan jawaban, namun secara halus menanamkan keraguan dan informasi palsu di benak pembaca tanpa menyatakannya secara langsung. Dengan demikian, berbagai strategi linguistik ini menjadi alat utama dalam membentuk opini publik dan memperkuat narasi hoaks politik di ruang digital.

Frasa Kunci yang Umum Digunakan dalam Wacana Hoaks Politik

Tabel 1.1

Kategori	Contoh Frasa Kunci	Fungsi Retoris
Ketidakpastian	"Katanya", "Diduga", "Beredar informasi"	Menyisipkan hoaks tanpa menyatakan secara tegas
Keagamaan	"Aamiin", "InsyaAllah menang", "Doa rakyat"	Membangun koneksi emosional dan nilai spiritual
Kecurangan	"Curang!", "Manipulasi suara", "KPU terlibat"	Menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi
Visual-Palsu	"Sudah dicoblos", "7 kontainer", "Promo KPU"	Membuat narasi seolah-olah berbasis bukti nyata
Dukungan Palsu	"Jokowi dukung capres X", "Kaulah yang pantas jadi RI-1"	Mengasosiasikan tokoh penting dengan kandidat tertentu

Pola Penyebaran di Media Sosial

Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi saluran utama penyebaran hoaks politik. Facebook dan Instagram sering memposting gambar dengan teks provokatif, sementara WhatsApp digunakan untuk pesan berantai. TikTok menggunakan video singkat, sedangkan Twitter menggunakan thread dan tagar politik.

Konten visual mencolok, meme, atau tangkapan layar palsu adalah beberapa contoh hoax. Penggunaan tagar populer seperti #2024GantiPresiden dan #JokowiDukungX memungkinkan pesan untuk mencapai lebih banyak orang. Sumber hoaks biasanya berasal dari akun anonim atau grup yang tertutup, dan disebarluaskan oleh bot atau simpatisan yang tidak terverifikasi. Bahasanya emosional, spekulatif, dan persuasif, dan menggunakan algoritma digital untuk mempercepat penyebaran.

Hoaks politik sering digunakan oleh aktor berpengaruh seperti tim sukses, buzzer, dan jaringan influencer untuk mendominasi narasi publik dan menekan suara kritis melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Praktik ini memiliki banyak tujuan tersembunyi, termasuk menang dalam kontestasi politik, menghasilkan uang, atau menyebarkan ideologi tertentu, seperti nasionalisme sempit, religiusitas, atau anti-elitisme. Strategi ini menggunakan akun anonim untuk menyamarkan identitas orang yang menyebarkan hoaks dan menciptakan kesan bahwa hoaks adalah suara rakyat. Akibatnya, hubungan kuasa digital menjadi tidak stabil, yang memungkinkan segelintir aktor untuk mengontrol ruang publik dengan tujuan tertentu, meskipun harus mengorbankan kebenaran dan keakuratan data.

Evaluasi Teknologi Artificial Intelligence (AI)

Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai unggahan hoaks politik digital pada gambar di atas, *Artificial Intelligence* (AI), terutama teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) dan analisis sentimen, adalah komponen utama dalam deteksi dan klasifikasi hoaks politik secara otomatis. Kemampuan automasi dan analisis skala besar adalah keunggulan AI dalam deteksi hoaks politik. Dengan bantuan *natural language processing* (NLP) dan *machine*

learning, sistem dapat memproses ribuan hingga jutaan konten dari portal berita dan media sosial dengan efisiensi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Selain itu, proses pengolahan bahasa natural dapat mendeteksi pola bahasa yang umum untuk hoaks, seperti penggunaan kata-kata sensasional, hiperbolik, atau emosional, dan membedakan pendapat subjektif yang dikemas sebagai fakta. Selain itu, analisis sentimen memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kecenderungan emosi dalam teks, yang seringkali merupakan karakteristik disinformasi politik. Melalui *Named Entity Recognition* (NER), AI dapat mengenali nama tokoh, organisasi, atau lokasi, lalu memverifikasi klaim dengan basis data eksternal untuk mendeteksi inkonsistensi atau fabrikasi. Model *machine learning* seperti SVM, *Naive Bayes*, hingga *deep learning* (misal: GBERT) dapat dilatih dengan dataset berita asli dan palsu untuk mengenali pola-pola linguistik yang membedakan keduanya secara statistik.

Namun, AI memiliki beberapa keterbatasan yang signifikan. Akurasi model belum sempurna, terutama ketika menghadapi hoaks baru dengan gaya bahasa atau konteks yang berbeda dari data pelatihan. Performa model sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keragaman dataset; jika dataset tidak representatif, model menjadi bias dan tidak fleksibel dalam konteks lokal. Selain itu, banyak model AI beroperasi sebagai "kotak hitam", yang membuat lebih sulit untuk menjelaskan mengapa keputusan deteksi hoaks dibuat, menurunkan kepercayaan publik, dan membuat proses verifikasi manual lebih sulit. Ketika AI generatif berkembang, hal itu memungkinkan pembuatan hoaks yang sangat bervariasi dan berkualitas tinggi. Akibatnya, model deteksi berbasis klasifikasi teks seringkali tidak cukup. Analisis multimodal, yang menggabungkan teks, gambar, dan video, diperlukan karena banyak hoaks politik sekarang hadir dalam bentuk meme, gambar, atau video suara.

Ada kemungkinan besar bahwa AI dapat mendeteksi hoaks politik. Dengan menggabungkan analisis gambar, video, dan teks, integrasi multimodal akan meningkatkan kemampuan deteksi lintas format. Pengembangan kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan (XAI) yang dapat menjelaskan deteksi hoaks secara jelas akan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas sistem kecerdasan buatan. Masa depan deteksi hoaks akan memungkinkan penjelasan dan sumber verifikasi secara otomatis untuk membangun literasi digital publik. Agar sistem AI semakin relevan dan akurat dalam menghadapi dinamika hoaks politik di berbagai negara, akan sangat penting untuk mengembangkan dataset dan model yang sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan politik lokal.

Contoh pada gambar-gambar di atas memperlihatkan bagaimana hoaks politik dapat muncul dalam berbagai bentuk—mulai dari pesan teks, gambar editan, hingga dokumen palsu—yang seluruhnya dapat menjadi objek analisis bagi sistem AI berbasis NLP dan multimodal. Dengan pengembangan yang tepat, AI berpotensi besar menjadi alat utama dalam menjaga ekosistem informasi politik yang sehat dan akurat.

Teknologi AI berbasis NLP dan analisis sentimen telah membawa kemajuan signifikan dalam deteksi dan klasifikasi hoaks politik secara otomatis, namun belum menjadi solusi sempurna. Tantangan utama meliputi keterbatasan akurasi, representasi data, dan kemampuan menjelaskan keputusan model. Pengembangan ke depan harus berfokus pada integrasi multimodal, explainable AI, serta adaptasi terhadap dinamika hoaks yang terus berkembang.

Penerapan Teori Analisis Wacana Kritis

Teori Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Teun A. van Dijk sangat efektif untuk mengungkap makna tersembunyi, relasi kuasa, dan strategi bahasa dalam teks-teks hoaks

politik digital. Pendekatan ini membedah teks pada tiga level utama: struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

1. Struktur Makro (*Macrostructure*)

Makna global teks, atau topik utama yang ingin disampaikan, adalah pusat struktur makro. Struktur makro yang digunakan dalam hoaks politik digital sering kali mengangkat isu-isu yang signifikan atau mengangkat narasi yang memiliki potensi untuk memecah belah atau memengaruhi opini publik. Misalnya, gambar keempat menunjukkan dokumen KPU bertuliskan "DISINFORMASI". Fokus utama dari dokumen tersebut adalah mempertanyakan legitimasi keputusan yang dibuat oleh KPU, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

2. Superstruktur (*Superstructure*)

Superstruktur adalah kerangka atau pola organisasi teks yang mengatur bagian-bagiannya seperti pembukaan, isi, dan penutup sehingga membentuk cerita yang utuh. Superstruktur hoaks politik sering menuntun pembaca dari pernyataan awal yang provokatif ke "bukti" atau klaim yang tampak logis, lalu diakhiri dengan ajakan atau kesimpulan yang memperkuat cerita yang salah. Untuk ilustrasi, gambar kedua memulai cerita dengan slogan "WELCOME #2024", diikuti oleh visualisasi dukungan politik, dan ditutup dengan label "HOAX", yang, jika diungkapkan kembali tanpa konteks, dapat menimbulkan keraguan.

3. Struktur Mikro (*Microstructure*)

Struktur mikro melihat elemen bahasa lokal seperti pilihan kata, kalimat, gaya, dan retorika. Pada tingkat ini, analisis menyelidiki bagaimana kata-kata tertentu dipilih untuk membangun citra, menanamkan prasangka, atau memperkuat stereotip. Hoaks politik sering menggunakan diksi yang emosional, hiperbolik, atau yang menstigma lawan politik. Misalnya, dalam gambar pertama, frasa "Sholat No. 1, Presiden No. 2" memanfaatkan diksi yang berkaitan dengan agama untuk memengaruhi pendapat politik.

4. Relasi Kuasa dan Strategi Bahasa

Van Dijk menyatakan bahwa wacana adalah cara untuk menghasilkan dan menyebarkan kekuasaan, dan hal ini terbukti dalam praktik hoaks politik digital, seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar di atas. Dalam situasi seperti ini, teks dan visual digunakan secara strategis untuk memanipulasi opini publik, mendiskreditkan pihak yang bertentangan dengan pemerintah, dan memperkuat kekuasaan kelompok tertentu.

Persuasi dan manipulasi adalah strategi utama. Misalnya, gambar pertama dan kedua menggunakan slogan provokatif, pernyataan tanpa bukti yang kuat, dan narasi yang menciptakan persepsi yang salah atau benar. Selain itu, taktik *ad hominem* dan generalisasi sering digunakan, seperti menuduh pihak tertentu tanpa dasar yang jelas atau menyematkan label "hoax" dan "disinformasi" tanpa memberikan penjelasan yang mendalam, memaksa pembaca untuk mempercayai cerita yang diinginkan penyebar hoaks.

Legitimasi adalah pendekatan berikutnya, yang mencakup upaya untuk menciptakan kesan yang asli dan dapat diandalkan melalui penggunaan simbol negara, penampilan tokoh publik, atau bentuk dokumen resmi. Misalnya, gambar keempat menampilkan dokumen KPU dengan cap besar "DISINFORMASI". Ini membuatnya terlihat seperti dokumen tersebut benar-benar dikeluarkan oleh lembaga resmi. Pesan yang diretas pada papan elektronik masjid memberi kesan bahwa itu berasal dari institusi agama, seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama. Ini memperkuat keyakinan yang ingin disebarkan.

Selain itu, ada pendekatan inklusi dan eksklusif, di mana informasi yang dimunculkan atau disembunyikan digunakan untuk membuat cerita yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Misalnya, pada gambar ketiga, cerita dan visual hanya menampilkan aspek positif dari seorang tokoh dan menghilangkan detail yang mungkin bertentangan dengan cerita. Sementara itu, dalam dokumen palsu atau editan gambar, informasi yang merugikan kelompok tertentu sering dihilangkan atau dipelintir.

5. Integrasi Tiga Dimensi

Van Dijk menggabungkan tiga elemen: analisis teks, kognisi sosial (yang merujuk pada proses pembuat teks untuk menghasilkan dan memproses wacana) dan konteks sosial (yang merujuk pada struktur sosial yang lebih luas di mana teks tersebar). Oleh karena itu, analisis mencakup tidak hanya struktur bahasa tetapi juga cara hoaks politik dibuat, disebarluaskan, dan diterima oleh masyarakat. Untuk mengungkap makna tersembunyi, hubungan kuasa, dan strategi bahasa dalam hoaks politik digital, teori analisis wacana kritis Van Dijk memberikan dasar yang luas. Analisis ini mampu mengungkap bagaimana hoaks dirancang untuk memengaruhi opini dan relasi kuasa di ruang publik dengan mempelajari struktur mikro, makro, dan superstruktur serta mengaitkannya dengan konteks sosial dan kognisi pembuat teks.

Simpulan

Artikel ini mengungkap bahwa wacana hoaks politik menjelang Pemilu 2024 disusun secara sistematis dengan strategi linguistik yang manipulatif, seperti penggunaan frasa imperatif, emotif, religius, hingga bentuk tanya retorik. Penyebarannya didukung oleh kekuatan media sosial dan algoritma digital yang mempercepat viralitas konten. Aktor yang terlibat mencakup tim politik formal, buzzer berbayar, akun anonim, media alternatif, hingga masyarakat umum yang kurang literasi digital. Narasi-narasi tersebut sarat dengan ideologi tertentu—populisme, religiusitas, anti-elitisme—dan menunjukkan relasi kuasa yang timpang, di mana aktor bermodal besar mendominasi wacana publik dan meminggirkan suara-suara kritis.

Teknologi *Artificial Intelligence* (AI), terutama *Natural Language Processing* dan analisis sentimen, terbukti mampu membantu proses deteksi hoaks dalam skala besar. Namun, AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks, ironi, dan dinamika lokal. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teknologi AI dengan teori Analisis Wacana Kritis ala Teun A. Van Dijk sangat dibutuhkan. Integrasi ini memungkinkan pembacaan yang lebih dalam terhadap struktur teks dan ideologi tersembunyi, sekaligus memperkuat upaya membangun ekosistem informasi politik yang lebih sehat, adil, dan demokratis di era digital.

Referensi

- Akrom, M. (2021). *Mengenal Teori Kritis Perspektif Barat dan Islam*. Bogor: Guepedia.
 Alwi et al. 1998, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
 Angger, B. (2013). *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?*. Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge and The Discourse on Language*. London: Tavistock Publication.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Irhamdhika, G. (2022). Mitigasi Hoaks di Era Disrupsi Melalui Literasi Digital. *J-IKA*, 9(1), 39–46.
- Jannah, L. S., dkk. (2024). Pemikiran kritis terhadap pendidikan Islam: Pendekatan inovatif. Qistina: *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 45-60.
- John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kaesmetan Hapsari. (2019). Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan. Universitas Nusa Cendana. Kupang.
- Mariana Dede & Caroline Paskarina. (2008). *Demokrasi dan Politik desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2005). *Kajian Wacana: Teori, Metode & Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Renkema, Jan. (1993). *Discourse Studies An Introductory Tekxtbook*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Sholahudin, U. (2020). Membedah teori kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, asumsi, kontribusinya terhadap perkembangan teori ilmu sosial. *Journal of Urban Sociology*, 3(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tri Sakti F. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal 1-143.
- Turban, E., & Aronson, J. E. (1995). *Decision Support Systems and Intelligent Systems* (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Van Dijk, T. A. (2006). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*